MODEL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR MELALUI PELIBATAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN TOKOH AGAMA

Oleh : **Nanang Kristanto**

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas Papua)
nanang.kristanto@kemdikbud.go.id; nanangkristanto@student.upi.edu

Abstrak: Setiap tahun angka buta aksara mengalami penurunan, tetapi untuk wilayah Papua dan Papua Barat angka buta aksaranya masih tinggi. Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar di Provinsi Papua mengalami tantangan berat yang harus diselesaikan, di antaranya adalah kondisi geografis serta ketersediaan akses layanan pendidikan. Diperlukan inovasi dan strategi yang relevan melibatkan berbagai potensi yang ada untuk dapat secara mandiri menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan. Tulisan ini bertujuan untuk memperluas akses dan jangkauan layanan pendidikan keaksaraan melalui model penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar melalui pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan pendekatan model campuran tidak berimbang (*concurrent embedded design*) antara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan lewat wawancara dengan pemerintah kampung dan tokoh agama, serta observasi dan diskusi terpumpun, sedangkan data kuantitatif diperoleh lewat *one-group pretest posttest design*. Kedua data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan cara reduksi, pengelompokan, dan interpretasi data, dan analisis data dilakukan secara deskriptif. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan selama sembilan bulan (Maret--November 2019) di Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura yang mencakup tiga distrik di Kabupaten Keerom, yang terdiri atas empat kampung, yaitu Kampung Yowong, Kampung Wambes, Kampung Ubiyau, dan Kampung Alang-Alang 5, serta satu distrik di Kota Jayapura, yaitu di Kampung Bunda Maria. Semua kampung yang menjadi lokasi penelitian dan pengembangan merupakan kampung dengan penduduk asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kampung dan tokoh agama secara mandiri dapat menyelenggarakan program keaksaraan dasar. Pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama dapat memperluas akses dan jangkauan penyelenggaraan program keaksaraan dasar, khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta daerah *remote area* yang tidak terdapat satuan pendidikan non-formal. Pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama berdampak pada kesadaran masyarakat yang buta aksara dalam mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar.

Kata kunci: keaksaraan dasar, pemerintah kampung, tokoh agama.

THE MODEL FOR IMPLEMENTING THE BASIC LITERACY PROGRAM IS THROUGH THE INVOLVEMENT OF VILLAGE GOVERNMENTS AND RELIGIOUS LEADERS

Abstract: Every year the illiteracy rate has decreased, but in Papua and West Papua the illiteracy rate is still high. The implementation of the basic literacy education program in Papua Province faces serious challenges that must be resolved, including geographical conditions and the availability of access to education services. Innovations and relevant strategies are needed that involve the various potentials that exist to be able to independently organize literacy education programs. This paper aims to expand access and reach of literacy education services through the model of delivering basic literacy education programs through the involvement of village governments

and religious leaders. This research and development is carried out by using a concurrent embedded design approach between qualitative and quantitative. Qualitative data were collected through interviews with village government and religious leaders, as well as guided observations and discussions, while quantitative data were obtained through a one-group pretest-posttest design. The two data were then processed and analyzed by means of reduction, grouping and data interpretation, and data analysis was carried out descriptively. This research and development was carried out for 9 months (March-November 2019) in Keerom Regency and Jayapura city which includes 3 districts in Keerom Regency which consists of 4 villages: Yowong, Wambes Village, Ubiyau Village, Alang-Alang 5 Village and one district in Jayapura City, namely in the village of Bunda Maria. All villages that were research and development locations were villages with indigenous Papuans. The results showed that the village government and religious leaders could independently organize a basic literacy program. The involvement of village governments and religious leaders can expand access and reach of basic literacy programs, especially in 3T areas and remote areas where there are no non-formal education units. The involvement of the village government and religious leaders has an impact on the awareness of the illiterate community in following the basic literacy education program.

Keywords: basic literacy, village government, religious leaders.

PENDAHULUAN

Papua menjadi salah satu provinsi dengan tingkat buta aksara tinggi yang disebabkan di antaranya oleh lokasi yang sulit dijangkau, biaya yang mahal, serta motivasi belajar warga yang rendah. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat buta untuk belajar mengakibatkan problem mereka sampai saat ini belum teratasi. Papua terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kota; sebanyak 80% berada di daerah pegunungan serta sulit akses.

Sulitnya akses menuju ke kabupaten serta tiap distrik yang ada menjadi salah satu masalah pendidikan secara umum. Hampir semua kabupaten memiliki karakteristik kesulitan akses yang sama, yaitu daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), terlebih kabupaten yang berbatasan dengan negara lain. Keerom merupakan kabupaten yang tingkat kesulitan aksesnya hampir sama dengan kabupaten yang berada di pegunungan. Walaupun akses menuju Kabupaten Keerom dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dengan waktu yang tidak lama dari Kota Jayapura, wilayah kabupaten tersebut memiliki *remote area*, serta tidak terjangkau oleh satuan pendidikan nonformal. Kabupaten Keerom terdiri atas 7 distrik, yaitu: Distrik Web, Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Waris, Distrik Arso,

Distrik Arso Timur, dan Distrik Skanto. (BPS Kab. Keerom, 2018).

Banyaknya wilayah yang berada di *remote area* atau 3T menjadi masalah dalam pemerataan dan jangkauan layanan pendidikan nonformal, khususnya pendidikan keaksaraan. Lembaga nonformal penyelenggara program keaksaraan, yaitu PKBM dan SKB, sebagian besar berada di Distrik Arso. Studi pendahuluan yang sudah dilakukan mencakup 3 distrik yang terdiri atas 4 kampung, serta satu distrik di Kota Jayapura menunjukkan bahwa penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar mengalami tantangan yang sangat berat. Kondisi geografis serta ketersediaan akses layanan pendidikan menjadi masalah yang harus segera mendapatkan solusi konkretnya. Untuk itu, diperlukan inovasi serta strategi yang relevan agar dapat menjawab masalah sulit akses serta ketersediaan layanan pendidikan dengan pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama sebagai penyelenggara program.

Kampung adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua di bawah distrik. Istilah *kampung* menggantikan *desa* yang sebelumnya digunakan di Papua, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini

merupakan dampak dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tokoh diartikan sebagai 'orang yang terkemuka/terkenal, anutan'. Tokoh adalah orang yang berhasil di bidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. *Tokoh agama* didefinisikan sebagai 'seseorang yang berilmu, terutama dalam hal perkaitan dalam agama/keyakinan'; ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.

Secara spesifik penelitian dan pengembangan ini ingin mengetahui apakah model penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar melalui pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama dapat memperluas akses dan jangkauan layanan pendidikan keaksaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5). Dalam tahapannya penelitian pengembangan ini terbagi dalam beberapa tahap penelitian pengembangan yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 02 Tahun 2016, yaitu studi pendahuluan, penyusunan model, uji coba model, dan validasi model.

Subjek dalam penelitian dan pengembangan model ini adalah perangkat kampung, tokoh agama, masyarakat, kepala SKB, pamong belajar SKB, dan staf.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model campuran tidak berimbang (*concurrent embedded design*) dengan pendekatan kualitatif sebagai metode primer. Pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif digunakan bersama dengan pendekatan kualitatif dengan metode eksperimen. Karena metode primer yang digunakan adalah metode kualitatif, bobot metode lebih bertumpu pada metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses yang terjadi dalam penyelenggaraan program keaksaraan dasar dengan menggunakan panduan yang telah disusun sebagai acuannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan soal tes berbentuk pilihan ganda.

Data kualitatif dianalisis dengan mereduksi data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Selanjutnya, data disajikan sesuai dengan klasifikasi kebutuhan serta ditarik sebuah kesimpulan atas data tersebut. Data kuantitatif diolah dengan paired sample t- test. paired t-test sample merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji efektifitas perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata rata sesudah diberikan perlakuan, data tersebut digunakan sebagai pendukung dan pelengkap (Sugiyono, 2013: 217).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Ada dukungan penyelenggaraan program keaksaraan dasar dari pemerintah kampung (sekretaris kampung dan warga masyarakat yang masih tuna aksara) dan tokoh agama. Selama ini penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar melalui satuan pendidikan, seperti PKBM, tetapi PKBM yang ada di daerah tidak dapat menjangkau kampung yang masyarakatnya masih tuna aksara disebabkan lokasinya yang jauh.

Pemerintah kampung bersedia untuk menyelenggarakan program keaksaraan dasar.

SDM yang mencukupi menjadi pertimbangan untuk melibatkan pemerintah kampung. Jika kampung tersebut tidak mendapatkan perhatian dan pendampingan penyelenggaraan program keaksaraan dasar dari PKBM atau *stakeholder* terkait, akan menambah jumlah tuna aksara, khususnya di Kabupaten Keerom.

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan model pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar. Dalam model pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan/SKB sebagai motor penggerak menentukan kampung yang menjadi sasaran penyelenggaraan Program KD dengan kriteria sulit akses, angka buta aksara tinggi, tidak terdapat SPNF di kampung atau sekitar kampung, dan tidak terlayani program keaksaraan dasar. Penelitian pengembangan ini melibatkan SKB sebagai motor penggerak program. SKB membuat pertemuan dengan kepala kampung beserta perangkat kampung lainnya dan tokoh agama untuk membentuk tim penyelenggara program.
2. Kepala kampung membentuk tim penyelenggara program yang terdiri atas lima orang, wajib melibatkan sekretaris kampung dan tokoh agama, untuk tiga lainnya boleh dari unsur tokoh lainnya atau perangkat kampung lainnya. Tim penyelenggara akan menyusun RAB, merekrut tutor, merekrut warga belajar. Bersama-sama dengan warga belajar dan tutor, dia membentuk kelompok belajar dan menyusun jadwal belajar. Selanjutnya tim juga berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi akhir program dan mengusulkan SUKMA kepada dinas pendidikan terkait. Hasilnya, pemerintah kampung mampu membentuk tim, dibuktikan dengan terbitnya SK tim penyelenggara program keaksaraan dasar.
3. Tokoh agama dalam model ini berperan sebagai perekrut warga belajar karena tokoh agama dalam kampung mengetahui secara pasti jemaahnya, apakah buta

aksara atau tidak. Masyarakat juga lebih mendengarkan tokoh agama daripada tokoh lainnya serta menjadi motivator WB untuk konsisten mengikuti program keaksaraan dasar.

4. Tim juga berhasil merekrut tutor sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria dalam model ini, yakni tutor harus diterima oleh warga belajar, dengan kualifikasi diutamakan SMA/ sederajat, tinggal di kampung, serta mampu mengisi portofolio.
5. Tutor, WB, dan tim mampu menyusun jadwal pembelajaran dan disepakati bersama. Hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan pembelajaran keaksaraan dasar.
6. Tim dapat menyelenggarakan evaluasi akhir program keaksaraan dasar dengan menggunakan instrumen yang melekat dalam model ini. Hasil evaluasi sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom melalui SKB.

Untuk mengetahui keterbacaan, kemenarikan, dan keterlaksanaan, peneliti menggunakan skala Likert dan mendapatkan hasil uji keterbacaan dan kemenarikan dengan nilai rata-rata 45,91 dengan persentase 76,52 %. Sementara itu, uji keterlaksanaan panduan dalam model ini adalah 59,79. Dari hasil tes awal dan tes akhir didapat bahwa rata-rata hasil tes awal adalah 40,39 dan tes akhir diperoleh rata-rata 66,98.

Uji efektivitas model ini juga dilaksanakan dengan menguji keterlaksanaan semua tahapan dalam model ini. Hasil dari pedoman wawancara dengan menggunakan ceklis didapatkan hasil bahwa persentase kesesuaian pelaksanaan tahapan model 60,60%.

Hasil Uji *Paired T-Test* menunjukkan data sebagai berikut :

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	pretest	40.3095	21	26.38687	5.75809
	posttest	66.9810	21	14.55097	3.17528

Dari *output* hasil SPSS 25 for mac diperlihatkan ringkasan deskriptif hasil dari *pretest* dan *post-test*. Untuk nilai *pretest* diperoleh nilai rata-rata 40,30, sedangkan untuk nilai *post-test* diperoleh nilai rata-rata 66,98. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 21 orang penyelenggara model. Karena nilai rata-rata *pretest* 40,30 (<) lebih kecil daripada nilai rata-rata *post-test* 66,98, secara deskriptif ada perbedaan rata-rata pemahaman penyelenggaraan program keaksaraan antara hasil *pre-test* dengan *post-test*. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, dalam pembahasan ini perlu ditafsirkan hasil uji *Paired T-Test*.

Paired Samples Test

Mean		Paired Differences					t		df	Sig. (2-tailed)	
		Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference							
				Lower	Upper						
Pair 1	pretest - posttest	-26.67143	22.40489	4.88915	-36.87001	-16.47284	-5.455	Pair 1	pretest - posttest	20	.000

Uji *Paired T Test* ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya keefektifan model untuk mencapai tujuan pengembangan model. Rumus hipotesis keefektifan adalah sebagai berikut.

H_0 : tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil *pre-test* dan *post-test* orientasi model penyelenggaraan program keaksaraan dasar melalui pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama sehingga dikatakan tidak efektif.

H_a : ada perbedaan rata-rata antara hasil *pre-test* dan *post-test* orientasi model penyelenggaraan program keaksaraan dasar melalui pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama sehingga dikatakan efektif.

Hal tersebut merujuk pada pedoman pengambilan keputusan dalam uji *paired sample t-test* (Santoso, 2014: 265). Pedoman pengambilan keputusan dalam uji *paired sample t-test* berdasarkan nilai (sig.) hasil *output* SPSS, sebagai berikut.

1. Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika sebaliknya nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan tabel *output paired sample T test* di atas, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar

0.000 > 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil *pre-test* dan *post-test* orientasi model penyelenggaraan program keaksaraan dasar melalui pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama sehingga dikatakan efektif. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa t hitung -5.455. Nilai minus berarti hasil rata-rata *pre-test* lebih kecil daripada *post-test*.

Pembahasan

Sesuai dengan tujuan, model ini dibuat untuk memperluas akses dan jangkauan pelaksanaan program keaksaraan dasar, khususnya daerah 3T serta *remote area* yang tidak terdapat satuan pendidikan nonformal (SPNF).

Tolok ukur tercapainya tujuan ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden sebagai pelaksana model ini. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada responden, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kampung mampu membentuk tim penyelenggara program keaksaraan dasar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam panduan model ini. Terbentuknya tim penyelenggara program keaksaraan ini dibuktikan dengan diterbitkannya SK tim yang dikeluarkan oleh pemerintah kampung dan ditandatangani oleh kepala kampung. SK tersebut menjadi indikator bahwa tujuan tercapai.

Lokasi uji coba yang tidak terjangkau SPNF serta tidak terdapat SPNF mendorong peneliti untuk menghadirkan layanan pendidikan nonformal, khususnya pendidikan keaksaraan. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2018, Provinsi Papua masih menempati peringkat pertama dengan angka buta aksara tertinggi seluruh Indonesia. Untuk dapat menyelenggarakan program penuntasan buta aksara, diperlukan wadah/sarana/pengelola program agar program pendidikan non-formal, khususnya keaksaraan, dapat diselenggarakan.

Untuk dapat membentuk wadah/sarana/pengelola program, perlu inisiasi dari pemerintah daerah ataupun SPNF lainnya untuk dapat mendorong pemerintah kampung menjadi pengelola program secara mandiri. Mengingat lokasi uji coba, yaitu Kampung Yowong, Kampung Ubiyau, dan Kampung Alang-Alang Raya belum pernah sama sekali terlibat langsung dalam penyelenggaraan program pendidikan khususnya pendidikan keaksaraan, pemerintah atau SPNF perlu mengambil peran untuk mendorong pemerintah kampung agar dapat mandiri menyelenggarakan program keaksaraan.

Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa penyelenggara pendidikan nonformal adalah satuan pendidikan, satuan pendidikan dalam model ini ditempatkan sebagai penyelenggara sekaligus motor penggerak pemerintah kampung untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan. Dalam model ini juga diatur tentang keterlibatan penuh pemerintah kampung dan tokoh agama melalui kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi tim pengelola program keaksaraan dasar. Tim pengelola program keaksaraan harus tinggal di kampung tersebut atau di sekitar kampung dengan jarak maksimal 3 km. Kriteria tersebut diberikan agar pengelolaan program/tim menjadi lebih efektif dari sisi biaya ataupun pengelolaan programnya. Selama ini kampung-kampung ini hanya menerima program saja tanpa tahu bagaimana

pengelolaannya. Pemerintah kampung selama ini juga hanya mengetahui bahwa ada penyelenggaraan pendidikan nonformal, seperti kursus, kewirausahaan atau keaksaraan tanpa dilibatkan secara langsung dalam proses penyelenggaraannya.

Dengan adanya model ini diharapkan pemerintah kampung dapat secara mandiri menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal, khususnya program keaksaraan dasar secara mandiri. Kemandirian ini penting ditumbuhkan kepada pemerintah kampung dan masyarakat pada umumnya agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan di kampungnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmar andi ahmad dkk bahwa Perlu adanya penekanan pengaplikasian konsep pendekatan tokoh atau keluarga, karena proses pembelajarannya masih terfokus pada peserta didik (jurnal Akrab, 2019).

Pelibatan Pemerintah kampung dan tokoh agama dalam model ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmar merupakan pola penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar yang baru.

Jika dilihat dari sisi sumber daya manusia (SDM), pemerintah kampung sudah bisa dikatakan mencukupi untuk dapat mengelola program pendidikan keaksaraan. Untuk dapat menyelenggarakan program keaksaraan tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu. Yang dibutuhkan adalah komitmen pemerintah untuk dapat menyelenggarakannya.

Selain itu, dalam model ini wajib melibatkan tokoh agama. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Dari hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan dan pengalaman peneliti ke berbagai daerah di Provinsi Papua, masyarakat cenderung lebih mendengarkan tokoh agama daripada tokoh-tokoh yang lain ataupun pemerintah kampung walaupun hal tersebut tidak berlaku secara keseluruhan. Namun,

tokoh agama dilibatkan dalam model ini lebih karena peran tokoh agama untuk dapat mengidentifikasi warga belajar yang buta aksara serta mampu memotivasi warga belajar untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan. Tokoh agama sudah terbukti mampu berperan banyak dalam mengubah kehidupan masyarakat, khususnya di Provinsi Papua.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harianto bahwa tokoh agama dapat meningkatkan motivasi belajar warga buta aksara disebabkan karena memiliki kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama (Jurnal Akrib, 2020).

Agar mampu mempercepat penuntasan buta aksara di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Keerom, indikator yang harus dicapai untuk dapat menjawab tujuan model ini adalah terselenggaranya kegiatan pembelajaran program keaksaraan dasar di tiap kampung lokasi uji coba. Untuk dapat memastikan bahwa di tiap kampung terselenggara kegiatan pembelajaran keaksaraan sampai warga belajar memperoleh SUKMA (Surat keterangan Melek Aksara), harus dibuktikan dengan adanya dokumen/ pernyataan dari tim penyelenggara program di kampung.

Bukti bahwa KBM keaksaraan dasar di kampung terselenggara adalah adanya jadwal yang sudah disusun sesuai dengan kesepakatan antara warga belajar dan tutor. Hasil uji coba menunjukkan bahwa jadwal pembelajaran sudah disepakati oleh tutor dan warga belajar, tetapi dalam pelaksanaannya jadwal pembelajaran tidak didokumentasikan dalam bentuk tertulis. Selain itu, jadwal tempat pembelajaran keaksaraan harus terpasang di spanduk yang menyatakan bahwa di kampung tersebut terdapat kelompok belajar program keaksaraan dasar. Hasil uji coba menunjukkan bahwa spanduk dipasang tidak permanen. Hal tersebut untuk mengantisipasi tempat belajar yang berpindah-pindah atau fleksibel. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran keaksaraan

bahwa pembelajaran dapat diselenggarakan di mana saja sesuai dengan kesepakatan bersama.

Selain itu dibuatnya model ini adalah untuk memberikan panduan yang operasional serta mudah dipahami. Pemerintah kampung bukanlah SPNF yang biasa menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Namun, pemerintah kampung mempunyai kewajiban menjamin masyarakat memperoleh pendidikan.

Untuk dapat menyelenggarakan program keaksaraan dasar, dibuatlah panduan dan mekanisme penyelenggaraan sehingga menjadi sebuah model penyelenggaraan program keaksaraan dasar melalui pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama. Model ini terdiri atas master model yang berisi prototipe mekanisme penyelenggaraan model serta delapan panduan operasional, yakni panduan pembentukan tim, panduan identifikasi dan rekrutmen warga belajar, panduan identifikasi dan rekrutmen tutor, panduan pembentukan kelompok belajar, panduan pembelajaran, panduan identifikasi sumber biaya dan pengelolaan biaya, panduan evaluasi/penilaian program keaksaraan dasar.

Capaian keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya pemahaman pemerintah kampung dan tokoh agama tentang penyelenggaraan program keaksaraan dasar, serta terlaksananya tahapan model penyelenggaraan ini. Tidak hanya meningkat pemahaman dan pengetahuan tentang program keaksaraan, tetapi indikator keterlaksanaannya pun juga diukur melalui wawancara dan observasi kepada pelaksana program.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan adanya program pendidikan keaksaraan dasar di kampung yang diselenggarakan secara mandiri, model penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar melalui pelibatan pemerintah kampung dan tokoh agama ini efektif mampu memperluas akses penyelenggaraan keaksaraan dasar, khususnya

di daerah 3T serta daerah *remote area*, yang tidak terdapat satuan pendidikan nonformal. Hal tersebut terlihat dari terbentuknya tim penyelenggara program dan berjalannya kegiatan pembelajaran program secara mandiri.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan analisis model ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk pemerintah kampung sebagai penyelenggara model ini, diharapkan bisa menjalin kerja sama dengan berbagai tokoh serta perangkat kampung, agar penyelenggaraan model ini bisa dibiayai secara mandiri oleh pemerintah kampung.

Kedua, dinas pendidikan/SKB/SNPF perlu lebih maksimal menjalankan perannya sebagai penanggung jawab sekaligus melakukan pemantauan dan pengawasan agar model ini dapat berjalan dan mencapai tujuan utama model ini dibuat.

Ketiga, BP PAUD dan Dikmas Papua perlu menyelenggarakan diseminasi model ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan serta mampu menjadi solusi perluasan akses penyelenggaraan program keaksaraan dasar.

Rekomendasi diberikan kepada dinas pendidikan/sanggar kegiatan pembelajaran serta SPNF lainnya untuk dapat menggunakan model ini agar pelayanan perluasan akses dan keterjangkauan program pendidikan keaksaraan dapat terwujud dan buta aksara dapat diselesaikan di Papua. Dengan model ini diharapkan pelaksanaannya dapat lebih efektif dan lebih efisien dalam pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akker, J. Van Den. 2006. "Chapter 1: Principles and Methods of Development Research". Dalam *Educational Design Research*. Arizona: Routledge.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (September, 2018). "Indonesia Peringati Hari Aksara Internasional Tahun 2018". *Kemdikbud.go.id*. Diakses dari : <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/09/indonesia-peringati-hari-aksara-internasional-tahun-2018/data> BPS 2018.

- Borg, Walter R. dan Meredith Damien Gall. 1983. *Educational Research: An Introduction*. New York: Longman Inc.
- Borg, W.R. dan Gall, M.D. 1989. *Educational Research: An Introduction* (5th Ed). New York & London: Longman, Inc.
- BPS Keerom (November, 2018). "Luas Wilayah, Jarak dari Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten Keerom, dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Distrik. *Keeromkab.bps.go.id*. Diakses dari: <https://keeromkab.bps.go.id/statictable/2015/06/05/8/luas-wilayah-jarak-dari-ibukota-distrik-ke-ibukota-kabupaten-keerom-dan-ketinggian-dari-permukaan-laut-menurut-distrik.html>.
- Creswell, J.W. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariato, 2020. Studi Deskriptif Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Melalui Pelibatan Tokoh Agama. *Jurnal AKRAB*. Volume VI Edisi1Doi: <https://doi.org/10.26499/jurnalakrab.v11i1.308>.
- Ilmar, Dkk. 2019. Pola Penyelenggaraan keaksaraan dasar di sanggar kegiatan belajar. *Jurnal AKRAB*. Vol. 10 Edisi 2. Doi: <https://doi.org/10.26499/jurnalakrab.v10i2.291>
- Kemdikbud. 2018. *Panduan Penilaian Akhir Pendidikan keaksaraan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan*. Jakarta.
- Kemdikbud. 2018. *Panduan Penyelenggaraan dan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan*. Jakarta.
- Kemdikbud. 2018. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, serta Provinsi Papua. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan*. Jakarta.
- Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Model Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Santoso, Singgih. 2014. *Statistik Multivariat, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. (Edisi Revisi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Weny Ekaswati. 2006. *Kepercayaan Masyarakat terhadap Kyai*. Naskah Publikasi. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, h. 7.